

# **PENGADILAN TINGGI BENGKULU**

## **LAPORAN KEUANGAN**

**Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember Tahun 2020**

**Jl. Pembangunan No. 21 Padang Harapan**

**Bengkulu - Bengkulu 38225**

**Telp. 073621585 Fax. 073621585**

**E-mail : [pt\\_bengkulu@yahoo.co.id](mailto:pt_bengkulu@yahoo.co.id)**



# LAPORAN KEUANGAN PENGADILAN TINGGI BENGKULU

Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2020

BAGIAN ANGGARAN 005.01

BADAN URUSAN ADMINISTRASI

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

Jl. Pembangunan No. 21 Padang Harapan

Telp. 073621585 Fax. 073621585

Bengkulu - Bengkulu 38225

E-mail : [pt\\_bengkulu@yahoo.co.id](mailto:pt_bengkulu@yahoo.co.id)

# DAFTAR ISI

## DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Pernyataan Tanggung Jawab	iii
Ringkasan Laporan	iv
I Laporan Realisasi Anggaran	iv
II Neraca	iv
III Laporan Operasional	iv
IV Laporan Perubahan Ekuitas	iv
V Catatan Atas Laporan Keuangan	
A. Penjelasan Umum	
A.1 Profil dan Kebijakan Teknis	1
A.2 Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan	2
A.3 Basis Akuntansi	2
A.4 Dasar Pengukuran	2
A.5 Kebijakan Akuntansi	2
B. Penjelasan Atas Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran	
B.1 Pendapatan	7
B.2 Belanja	8
B.3 Belanja Pegawai	9
B.4 Belanja Barang	9
B.5 Belanja Modal	10
B.6 Catatan Penting Lainnya Laporan Realisasi Anggaran	11
C. Penjelasan Atas Pos-Pos Neraca	
C.1 Kas di Bendahara Pengeluaran	12
C.2 Persediaan	12
C.3 Persediaan yang Belum Diregister	12
C.4 Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	12
C.5 Tanah	13
C.6 Tanah Belum Diregister	13
C.7 Peralatan dan Mesin	13
C.8 Peralatan dan Mesin Belum Diregister	14
C.9 Gedung dan Bangunan	14
C.10 Gedung dan Bangunan Belum Diregister	14
C.11 Jalan, Irigasi dan Jaringan	14
C.12 Jalan, Irigasi dan Jaringan Belum Diregister	14
C.13 Aset Tetap Lainnya	15
C.14 Aset Tetap yang Belum Diregister	15
C.15 Konstruksi Dalam Pengerjaan	15
C.16 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	15
C.17 Aset Tak Berwujud	16
C.18 Aset Lain-lain	16
C.19 Aset Lainnya yang Belum Diregister	16
C.20 Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya	17
C.21 Utang kepada Pihak Ketiga	17
C.22 Hibah Yang Belum Disahkan	17
C.23 Pendapatan Diterima Dimuka	18
C.24 Uang Muka dari KPPN	18
C.25 Utang Jangka Pendek Lainnya	18
C.26 Ekuitas	18
C.27 Catatan Penting Lainnya neraca	18
D. Penjelasan Atas Pos-Pos Laporan Operasional	
D.1 Pendapatan Negara Bukan Pajak	19
D.2 Beban Pegawai	19
D.3 Beban Persediaan	20

D.4	Beban Barang dan Jasa	20
D.5	Beban Pemeliharaan	21
D.6	Beban Perjalanan Dinas	21
D.7	Beban Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat	22
D.8	Beban Bantuan Sosial	22
D.9	Beban Penyusutan dan Amortisasi	22
D.10	Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	23
D.11	Surplus (Defisit) Penjualan Aset Non Lancar	23
D.12	Surplus (Defisit) Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	23
D.13	Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	23
D.14	Pos Luar Biasa	24
D.15	Catatan Penting Lainnya Laporan Operasional	24
E.	Penjelasan Atas Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas	
E.1	Ekuitas Awal	25
E.2	Surplus (Defisit) LO	25
E.3	Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar	25
E.4	Koreksi yang Menambah/Mengurangi Ekuitas	25
E.5	Transaksi Antar Entitas	26
E.6	Ekuitas Akhir	27
F.	Pengungkapan Penting Lainnya	28
VI.	Lampiran dan Daftar	

## *DAFTAR TABEL*

## DAFTAR TABEL

1	Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan	7
2	Perbandingan Realisasi Pendapatan Tahunan (Unaudited) TA 2020 dan 2019	7
3	Perbandingan PNPB Lainnya Tahunan (Unaudited) TA 2020 dan 2019	8
4	Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Tahunan (Unaudited) TA 2020	8
5	Perbandingan Belanja Pegawai Tahunan (Unaudited) TA 2020 dan 2019	9
6	Perbandingan Belanja Barang Tahunan (Unaudited) TA 2020 dan 2019	10
7	Perbandingan Belanja Modal Tahunan (Unaudited) TA 2020 dan 2019	10
8	Perbandingan Belanja Modal Tanah Tahunan (Unaudited) TA 2020 dan 2019	10
9	Perbandingan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahunan (Unaudited) TA 2020 dan 2019	11
10	Perbandingan Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan Tahunan (Unaudited) TA 2020 dan 2019	11
11	Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran Tahunan (Unaudited) TA 2020 dan 2019	12
12	Rincian Persediaan Tahunan (Unaudited) TA 2020 dan 2019	12
13	Rincian Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi Tahunan (Unaudited) TA 2020 dan 2019	12
14	Rincian Tanah Tahunan (Unaudited) TA 2020	13
15	Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Tahunan (Unaudited) Tahun 2020	15
16	Rincian Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya	17
17	Rincian Utang kepada Pihak Ketiga	17
18	Rincian Hibah Yang Belum Disahkan	17
19	Rincian Pendapatan Diterima Dimuka adalah sebagai berikut	18
20	Rincian Uang Muka dari KPPN adalah sebagai berikut :	18
21	Rincian Utang Jangka Pendek Lainnya adalah sebagai berikut	18
22	Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak Tahunan (Unaudited) TA 2020 dan 2019	19
23	Rincian Beban Pegawai Tahunan (Unaudited) TA 2020 dan 2019	19
24	Rincian Beban Persediaan Tahunan (Unaudited) TA 2020 dan 2019	20
25	Rincian Beban Barang dan Jasa Tahunan (Unaudited) TA 2020 dan 2019	20
26	Rincian Beban Pemeliharaan Tahunan (Unaudited) TA 2020 dan 2019	21
27	Rincian Beban Perjalanan Dinas Tahunan (Unaudited) TA 2020 dan 2019	21
28	Rincian Beban Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat Tahunan (Unaudited) TA 2020 dan 2019	22
29	Rincian Beban Bantuan Sosial Tahunan (Unaudited) TA 2020 dan 2019	22
30	Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi Tahunan (Unaudited) TA 2020 dan 2019	22
31	Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih Tahunan (Unaudited) TA 2020 dan 2019	23
32	Rincian Surplus (Defisit) Penjualan Aset Non Lancar Tahunan (Unaudited) TA 2020 dan 2019	23
33	Rincian Surplus (Defisit) Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang Tahunan (Unaudited) TA 2020 dan 2019	23
34	Rincian Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya Tahunan (Unaudited) TA 2020 dan 2019	24
35	Rincian Pos Luar Biasa Tahunan (Unaudited) 2020 dan 2019	24
36	Rincian Koreksi Nilai Persediaan	25
37	Rincian Selisih Revaluasi Aset Tahun 2020	26
38	Rincian Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi Tahun 2020	26
39	Rincian Koreksi Lain-Lain Tahun 2020	26
40	Rincian Transaksi Antar Entitas Tahun 2020	26
41	Rincian Transfer Keluar Tahun 2020	27
42	Rincian Pengesahan Hibah Langsung untuk Tahun 2020 adalah sebagai berikut :	27

# *KATA PENGANTAR*



## KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian/Lembaga yang dipimpinnya.

Pengadilan Tinggi Bengkulu adalah salah satu entitas akuntansi di bawah Mahkamah Agung yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggung jawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasi, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Pengadilan Tinggi Bengkulu. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).

Bengkulu, 7 Januari 2021

**Sekretaris**



**Endri Novian, SE**

**NIP. 197511092003121001**

# *PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB*

## PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Pengadilan Tinggi Bengkulu yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan periode 31 Desember 2020 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah.

Bengkulu, 7 Januari 2021

**Sekretaris**



**Endri Novian, SE**

**NRP. 197511092003121001**

# *RINGKASAN*

## RINGKASAN LAPORAN

Laporan Keuangan Pengadilan Tinggi Bengkulu Tahun 2020 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Keuangan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Laporan Keuangan ini meliputi :

### 1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur pendapatan LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2020.

Realisasi Pendapatan Negara sampai dengan 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp23.195.339 berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp23.195.339 atau mencapai 386,59 persen dari estimasi Pendapatan LRA sebesar Rp6.000.000.

Realisasi Belanja Negara sampai dengan 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp23.552.952.564 atau mencapai 99,51 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp23.668.278.000.

### 2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban dan ekuitas pada 31 Desember 2020 . Nilai Aset per 31 Desember 2020 dicatat dan disajikan sebesar Rp35.765.172.433 yang terdiri dari Aset Lancar sebesar Rp37.058.780; Piutang Jangka Panjang sebesar Rp0; Aset Tetap (neto) sebesar Rp35.728.113.653 dan Aset Lainnya (neto) sebesar Rp0.

Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp13.146.197 dan Rp35.752.026.236

### 3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar.

Pendapatan LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp17.195.340 sedangkan jumlah beban dari kegiatan operasional adalah sebesar Rp24.298.735.604 sehingga terdapat Defisit dari Kegiatan Operasional sebesar Rp-24.281.540.264, Surplus Kegiatan Non Operasional dan Defisit Pos Pos Luar Biasa masing-masing sebesar Rp6.169.539 dan Rp0 sehingga entitas mengalami Defisit-LO sebesar Rp-24.275.370.725.

### 4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Ekuitas pada tanggal 1 Januari 2020 sebesar Rp37.116.794.339, dikurangi Defisit-LO sebesar Rp-24.275.370.725 kemudian dikurangi dengan koreksi-koreksi sebesar - 631.154.603 dan Transaksi Antar Entitas sebesar 23.541.757.225 sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 31 Desember 2020 adalah senilai Rp35.752.026.236

## **5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Catatan Atas Laporan Keuangan menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis suatu nilai pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CALK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan diajarkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk Tahun 2020 disusun dan disajikan berdasarkan basis akrual

# *I. LRA PERBANDINGAN*

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN  
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2020 DAN 2019**

U R A I A N	Catatan	TA 2020		% thd Angg
		ANGGARAN	REALISASI	
<b>PENDAPATAN DAN HIBAH</b>				
Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1	6.000.000	23.195.339	386,59
<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>		<b>6.000.000</b>	<b>23.195.339</b>	<b>386,59</b>
<b>BELANJA</b>	B.2			
Belanja Pegawai	B.3	20.475.424.000	20.436.416.552	99,81
Belanja Barang	B.4	3.167.854.000	3.091.536.012	97,59
Belanja Modal	B.5	25.000.000	25.000.000	100,00
Belanja Bantuan Sosial	B.6	-	-	-
<b>JUMLAH BELANJA</b>		<b>23.668.278.000</b>	<b>23.552.952.564</b>	<b>99,51</b>



## *II. NERACA PERBANDINGAN*

**NERACA**  
**UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2020 DAN 2019**

URAIAN	Catatan	2020	2019
<b>ASET</b>			
<b>ASET LANCAR</b>			
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.1	-	-
Persediaan	C.2	37.058.780	16.830.150
Persediaan yang Belum Diregister	C.3	-	-
<b>Jumlah Aset Lancar</b>		<b>37.058.780</b>	<b>24.330.150</b>
<b>ASET TETAP</b>			
Tanah	C.4	28.332.813.000	28.332.813.000
Tanah Belum Diregister	C.5	-	-
Peralatan dan Mesin	C.6	4.416.479.668	4.379.479.668
Peralatan dan Mesin Belum Diregister	C.7	-	-
Gedung dan Bangunan	C.8	9.498.083.000	9.498.083.000
Gedung dan Bangunan Belum Diregister	C.9	-	-
Jalan, Irigasi dan Jaringan	C.10	-	-
Jalan, Irigasi dan Jaringan Belum Diregister	C.11	-	-
Aset Tetap Lainnya	C.12	28.490.950	28.490.950
Aset Tetap yang Belum Diregister	C.13	-	-
Konstruksi Dalam Pengerjaan	C.14	-	-
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	C.15	(6.547.752.965)	(5.123.647.042)
<b>Jumlah Aset Tetap</b>		<b>35.728.113.653</b>	<b>37.115.219.576</b>
<b>ASET LAINNYA</b>			
Aset Tak Berwujud	C.16	-	-
Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan	C.17	-	-
Aset Lain-lain	C.18	-	515.952.903
Aset Lainnya yang Belum Diregister	C.19	-	-
Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya	C.20	-	(515.942.903)
<b>Jumlah Aset Lainnya</b>		<b>-</b>	<b>10.000</b>
<b>JUMLAH ASET</b>		<b>35.765.172.433</b>	<b>37.139.559.726</b>
<b>KEWAJIBAN</b>			
<b>KEWAJIBAN JANGKA PENDEK</b>			
Utang kepada Pihak Ketiga	C.21	13.146.197	22.765.387
Utang Yang Belum Ditagihkan	C.22	-	-
Hibah Yang Belum Disahkan	C.23	-	-
Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan	C.24	-	-
Pendapatan Diterima Dimuka	C.25	-	-
Uang Muka dari KPPN	C.26	-	-
Utang Jangka Pendek Lainnya	C.27	-	-
<b>Jumlah Kewajiban Jangka Pendek</b>		<b>13.146.197</b>	<b>22.765.387</b>
<b>JUMLAH KEWAJIBAN</b>		<b>13.146.197</b>	<b>22.765.387</b>
<b>EKUITAS</b>			
Ekuitas	C.28	35.752.026.236	37.116.794.339
<b>JUMLAH EKUITAS</b>		<b>35.752.026.236</b>	<b>37.116.794.339</b>
<b>JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS</b>		<b>35.765.172.433</b>	<b>37.139.559.726</b>

### *III. LAPORAN OPERASIONAL*

## LAPORAN OPERASIONAL

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2020 DAN 2019

(Dalam Rupiah)

Uraian	Catatan	2020	2019
<b>KEGIATAN OPERASIONAL</b>			
<b>PENDAPATAN</b>			
Pendapatan Negara Bukan Pajak	D.1	17.195.340	28.764.920
<b>Jumlah Pendapatan</b>		<b>17.195.340</b>	<b>28.764.920</b>
<b>BEBAN</b>			
<b>BEBAN OPERASIONAL</b>			
Beban Pegawai	D.2	20.434.809.410	20.062.739.099
Beban Persediaan	D.3	56.115.450	50.179.450
Beban Barang dan Jasa	D.4	1.939.312.315	1.168.437.690
Beban Pemeliharaan	D.5	697.955.666	500.714.585
Beban Perjalanan Dinas	D.6	377.591.443	281.700.693
Beban Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat	D.7	-	-
Beban Bantuan Sosial	D.8	-	-
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.9	792.951.320	903.233.232
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	D.10	-	(7.250)
<b>Jumlah Beban</b>		<b>24.298.735.604</b>	<b>22.966.997.499</b>
<b>Surplus (Defisit) dari Kegiatan Operasional</b>		<b>(24.281.540.264)</b>	<b>(22.938.232.579)</b>
<b>KEGIATAN NON OPERASIONAL</b>			
Surplus (Defisit) Penjualan Aset Non Lancar	D.11	5.989.999	-
Surplus (Defisit) Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	D.12	-	-
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	D.13	179.540	(252.766)
<b>Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional</b>		<b>6.169.539</b>	<b>(252.766)</b>
<b>Surplus (Defisit) Sebelum Pos Luar Biasa</b>		<b>(24.275.370.725)</b>	<b>(22.938.485.345)</b>
<b>Pos Luar Biasa</b>	D.14		
Pendapatan PNB		-	-
Beban Perjalanan Dinas		-	-
Beban Persediaan		-	-
-		-	-
<b>SURPLUS/DEFISIT - LO</b>		<b>(24.275.370.725)</b>	<b>(22.938.485.345)</b>

**LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS**  
**UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2020 DAN 2019**

*(Dalam Rupiah)*

URAIAN	Catatan	2020	2019
<b>EKUITAS AWAL</b>	E.1	<b>37.116.794.339</b>	<b>38.056.622.946</b>
<b>SURPLUS/DEFISIT-LO</b>	E.2	<b>(24.275.370.725)</b>	<b>(22.938.485.345)</b>
<b>DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR</b>	E.3	-	-
<b>KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS</b>	E.4	<b>(631.154.603)</b>	<b>(24.974.123)</b>
Penyesuaian Nilai Aset	E.41	-	-
Koreksi Nilai Persediaan	E.42	-	-
Koreksi Atas Reklasifikasi	E.43	(631.154.603)	-
Selisih Revaluasi Aset	E.44	-	(28.011.000)
Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi	E.45	-	3.036.876
Koreksi Lain-Lain	E.46	-	1
<b>Jumlah</b>		<b>(631.154.603)</b>	<b>(24.974.123)</b>
<b>TRANSAKSI ANTAR ENTITAS</b>	E.5	<b>23.541.757.225</b>	<b>22.023.630.861</b>
<b>KENIAKAN/PENURUNAN EKUITAS</b>		<b>(1.364.768.103)</b>	<b>(939.828.607)</b>
<b>EKUITAS AKHIR</b>	E.6	<b>35.752.026.236</b>	<b>37.116.794.339</b>

## V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

# CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

## A. PENJELASAN UMUM

### A.1. Profil dan Kebijakan Teknis

*Dasar hukum Entitas  
dan Rencana Strategis*

Visi Pengadilan Tinggi Bengkulu adalah ikut berperan aktif untuk mewujudkan Badan Peradilan yang Agung. Sehingga terjalin kesinambungan dengan visi Mahkamah Agung RI yang menginginkan agar Mahkamah Agung dan Badan Peradilan dibawahnya menjadi lembaga yang dihormati, dimana didalamnya dikelola oleh hakim dan pegawai yang memiliki kemuliaan dan kebesaran serta keluhuran sikap dan jiwa dalam melaksanakan tugas\_pokoknya.

Misi Pengadilan Tinggi Bengkulu adalah :

1. Menjaga kemandirian badan peradilan
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan badan peradilan
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan

Untuk mewujudkan Visi dan Misi tersebut Pengadilan Tinggi Bengkulu melakukan beberapa langkah-langkah strategis sebagai berikut:

Rencana strategis merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan visi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun. Dengan diformulasikan Rencana Strategis, Pengadilan Tinggi Bengkulu akan dapat secara tepat mengetahui apa yang harus dilaksanakan oleh organisasi dalam memenuhi visi dan misi untuk kurun waktu satu sampai lima tahun ke depan dan memungkinkan untuk mengukur sejauh mana visi dan misi organisasi telah dicapai mengingat Rencana Strategis dirumuskan berdasarkan visi dan misi organisasi.

Rencana Strategis yang ditetapkan Pengadilan Tinggi Bengkulu adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kemampuan dan kinerja Pengadilan agar lebih efektif dan efisien
2. Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi peradilan

## **A.2. PENDEKATAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN**

Laporan Keuangan periode 31 Desember 2020 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Pengadilan Tinggi Bengkulu. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrua (SAIBA) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

## **A.3 BASIS AKUNTANSI**

Menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

## **A.4. DASAR PENGUKURAN**

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai proses historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing ditranslasi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

## **A.5. KEBIJAKAN AKUNTANSI**

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2020 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Mahkamah Agung yang merupakan entitas pelaporan dari Pengadilan Tinggi Bengkulu. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor 187/PB/2017 tentang Kodefikasi Segmen Akun pada Bagan Akun Standar, terdapat perubahan akun-akun terutama pada akun pendapatan negara bukan pajak.

Kebijakan-kebijakan akuntansi penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan adalah sebagai berikut:



#### Pendapatan-LRA

### (1) Pendapatan- LRA

- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi Pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

#### Pendapatan-LO

### (2) Pendapatan- LO

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan / atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada adalah sebagai berikut:
  - a Pendapatan Jasa Pelatihan diakui setelah pelatihan selesai dilaksanakan.
  - b Pendapatan Sewa Gedung diakui secara proporsional antara nilai dan periode waktu
  - c. Pendapatan Denda diakui pada saat dikeluarkannya surat keputusan denda atau dokumen lain yang dipersamakan.
- Akuntansi Pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

#### Belanja

### (3) Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN)
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan.

#### Beban

### (4) Beban

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

**(5) Aset**

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset

**a. Aset Lancar**

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
- Investasi Jangka Pendek BLU dalam bentuk surat berharga disajikan sebesar nilai perolehan sedangkan investasi dalam bentuk deposito dicatat sebesar nilai nominal.
- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
  - a) Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
  - b) Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal.
- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan	
<b>Lancar</b>	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
<b>Kurang Lancar</b>	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan.	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan.	10%
<b>Diragukan</b>	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
<b>Macet</b>	1. Satu bulan terhitung sejak Tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan. 2. Piutang telah diserahkan kepada panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	1. Satu bulan terhitung sejak Tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan. 2. Piutang telah diserahkan kepada panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	100%

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi (TP/TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TP/TGR atau Bagian Lancar TPA.
- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik pada tanggal neraca
  - \* harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
  - \* harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
  - \* harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

**b. Aset Tetap**

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.
- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapasitas sebagai berikut :
  - a. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olahraga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp 1.000.000 (satu juta rupiah);
  - b. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp.25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah);
  - c. Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapasitas tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang
- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.
- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN / BMD.

**c. Penyusutan Aset Tetap**

- Penyusutan Aset Tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.
- Penyusutan Aset Tetap tidak dilakukan terhadap:
  - a. Tanah;
  - b. Konstruksi dalam pengerjaan (KDP); dan
  - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.
- Perhitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat.  
Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

***Penggolongan Masa manfaat Aset Tetap***

<b>Kelompok Aset Tetap</b>	<b>Masa Manfaat</b>
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 Tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 Tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d. 40 Tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

**d. Piutang Jangka Panjang**

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai

**e. Aset Lainnya**

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, asetkerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.
- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.

**Penggolongan Masa manfaat Aset Tak Berwujud**

Kelompok Aset Tetap Tak Berwujud	Masa Manfaat (Tahun)
Software Komputer	4
Franchise	5
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu	10
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas, Tanaman Semusim.	20
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25
Hak Cipta atas Ciptaan Gol. II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram	50
Hak Cipta atas Ciptaan Gol. I	70

- Aset Lain-Lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

**(6) Kewajiban**

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.
  - a. Kewajiban Jangka Pendek**

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal

Kewajiban Jangka Pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.
  - b. Kewajiban Jangka Panjang**

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.
- Kewajiban dicatat sebesar nilai normal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

**(7) Ekuitas**

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

## B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Selama periode berjalan telah melakukan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari DIPA awal. Hal ini disebabkan oleh adanya perubahan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan situasi serta kondisi pada saat pelaksanaan. Perubahan tersebut berdasarkan sumber pendapatan dan jenis belanja, antara lain :

Uraian	2020	Anggaran Setelah Revisi
<b>Pendapatan</b>		
Penerimaan Negara Bukan Pajak	6.000.000	6.000.000
<b>Jumlah Pendapatan</b>	<b>6.000.000</b>	<b>6.000.000</b>
<b>Belanja</b>		
Belanja Pegawai	20.057.502.000	20.475.424.000
Belanja Barang	3.514.560.000	3.167.854.000
Belanja Modal	25.000.000	25.000.000
Belanja Bantuan Sosial	-	-
<b>Jumlah Belanja</b>	<b>23.597.062.000</b>	<b>23.668.278.000</b>

Realisasi Pendapatan  
Rp23.195.339

### B.1 Pendapatan

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp23.195.339 atau mencapai 386,59 persen dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp6.000.000. Pendapatan Pengadilan Tinggi Bengkulu terdiri dari Penerimaan Negara Bukan Pajak sebesar Rp23.195.339 dengan rincian sebagai berikut :

#### Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan

Uraian	2020		%
	Anggaran	Realisasi	
Penerimaan Negara Bukan Pajak	6.000.000	23.195.339	386,59
<b>Jumlah</b>	<b>6.000.000</b>	<b>23.195.339</b>	<b>386,59</b>

Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak mengalami penurunan sebesar 23,23 persen dibanding tahun sebelumnya. Rincian pendapatan adalah sebagai berikut :

#### Perbandingan Realisasi Pendapatan Tahunan (Unaudited) TA 2020 dan 2019

URAIAN	REALISASI T.A.2020	REALISASI T.A. 2019	%
Penerimaan Negara Bukan Pajak	23.195.339	30.215.155	(23,23)
<b>Jumlah</b>	<b>23.195.339</b>	<b>30.215.155</b>	<b>(23,23)</b>

Realisasi Penerimaan  
Negara Bukan Pajak  
Rp23.195.339

### B.1.1 Penerimaan Negara Bukan Pajak

Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 2019 adalah masing- masing sebesar Rp23.195.339 dan Rp30.215.155. Penerimaan Negara Bukan Pajak TA 2020 mengalami penurunan sebesar 23,23 dari TA 2019 karena pada Tahun 2020 tidak ada lagi pemberian persekot gaji pada pegawai di lingkungan Mahkamah Agung RI. Rincian Penerimaan Negara Bukan Pajak adalah sebagai berikut:

#### Perbandingan Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak Tahunan (Unaudited) TA 2020 dan 2019

URAIAN	REALISASI T.A.2020	REALISASI T.A. 2019	%
Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	23.195.339	30.215.155	(23,23)
<b>Jumlah</b>	<b>23.195.339</b>	<b>30.215.155</b>	<b>(23,23)</b>

Sedangkan Rincian PNPB Lainnya adalah sebagai berikut :

Perbandingan PNBP Lainnya Tahunan (Unaudited) TA 2020 dan 2019

URAIAN	REALISASI T.A. 2020	REALISASI T.A. 2019	%
Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	17.195.340	17.264.120	(0,40)
Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	5.999.999	-	-
Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	-	234	(100,00)
	-	-	-
<b>Jumlah</b>	<b>23.195.339</b>	<b>30.215.155</b>	<b>(23,23)</b>

Realisasi Belanja  
Rp23.552.952.564

## B.2 Belanja

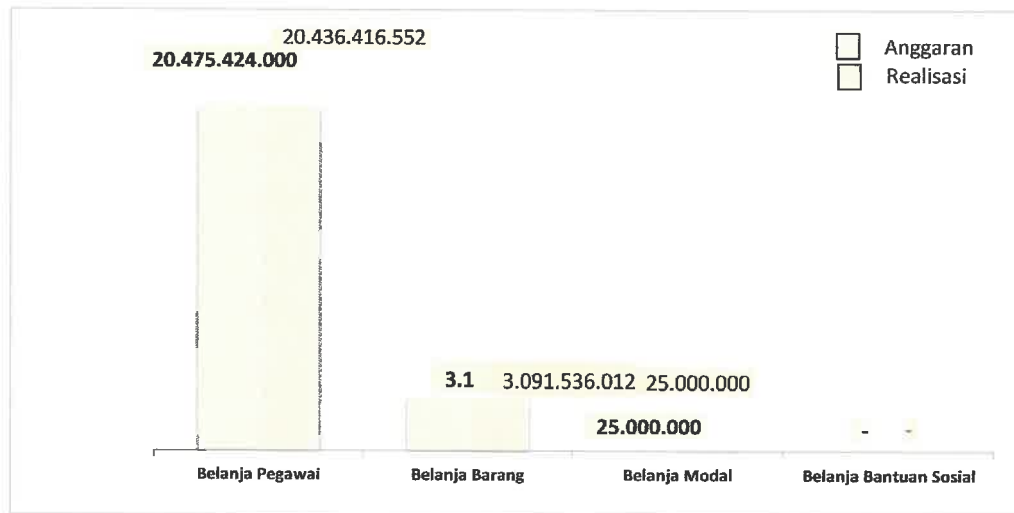
Realisasi Belanja pada TA 2020 adalah sebesar Rp23.552.952.564 atau 99,51 % dari anggaran belanja sebesar Rp.23.668.278.000 Rincian anggaran dan realisasi belanja TA 2020 adalah sebagai berikut:

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Tahunan (Unaudited) TA 2020

URAIAN	Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja TA 2020		
	Anggaran	Realisasi	% thdp Angg.
Belanja Pegawai	20.475.424.000	20.436.416.552	99,81
Belanja Barang	3.167.854.000	3.091.536.012	97,59
Belanja Modal	25.000.000	25.000.000	100,00
Belanja Bantuan Sosial	-	-	-
<b>Jumlah</b>	<b>23.668.278.000</b>	<b>23.552.952.564</b>	<b>99,51</b>

Komposisi anggaran dan realisasi belanja dapat dilihat dalam grafik berikut ini:

Komposisi Anggaran dan Realisasi Tahun 2020



Dibandingkan dengan TA 2019, Realisasi Belanja TA 2020 mengalami kenaikan sebesar 6,12% karena adanya penambahan belanja sewa, alokasi dan realisasi Belanja untuk Bimtek Perencanaan/Sosialisasi Program & Anggaran, dan penanganan pandemi covid19. . Berikut rincian realisasi belanja TA 2020 dan TA 2019.



Perbandingan Realisasi Belanja Tahunan (Unaudited) TA 2020 dan 2019

URAIAN	REALISASI T.A. 2020	REALISASI T.A. 2019	%
Belanja Pegawai	20.436.416.552	20.061.043.467	1,87
Belanja Barang	3.091.536.012	2.000.388.731	54,55
Belanja Modal	25.000.000	132.952.000	(81,20)
Belanja Bantuan Sosial	-	-	-
<b>Jumlah</b>	<b>23.552.952.564</b>	<b>22.194.384.198</b>	<b>6,12</b>

Realisasi Belanja  
Pegawai  
Rp20.436.416.552

### B.3 Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai per tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp20.436.416.552 dan Rp20.061.043.467. Belanja Pegawai adalah belanja atas kompensasi baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus sebagai PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Realisasi Belanja Pegawai TA 2020 mengalami kenaikan sebesar 1,87 % dari TA 2019. Hal ini disebabkan karena bertambahnya jumlah pegawai di tahun 2020.

Perbandingan Belanja Pegawai Tahunan (Unaudited) TA 2020 dan 2019

URAIAN	REALISASI T.A. 2020	REALISASI T.A. 2019	%
Belanja Gaji Pokok PNS	4.809.510.540	4.630.565.120	3,86
Belanja Pembulatan Gaji PNS	53.487	57.721	(7,34)
Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	398.280.820	373.931.930	6,51
Belanja Tunj. Anak PNS	64.102.280	67.132.796	(4,51)
Belanja Tunj. Struktural PNS	92.610.000	69.570.000	33,12
Belanja Tunj. Fungsional PNS	11.261.265.000	11.234.760.000	0,24
Belanja Tunj. PPh PNS	2.095.524.808	2.141.171.325	(2,13)
Belanja Tunj. Beras PNS	172.598.700	163.726.860	5,42
Belanja Uang Makan PNS	660.237.000	629.729.000	4,84
Belanja Tunjangan Umum PNS	55.105.000	51.755.000	6,47
Belanja Tunjangan Hakim Ad Hoc	837.000.000	700.000.000	19,57
	-	-	-
	-	-	-
<b>Jumlah Belanja kotor</b>	<b>20.446.287.635</b>	<b>20.062.399.752</b>	<b>1,91</b>
Pengembalian Belanja Pegawai	9.871.083	1.356.285	627,80
<b>Jumlah Belanja</b>	<b>20.436.416.552</b>	<b>20.061.043.467</b>	<b>1,87</b>

Realisasi Belanja  
Barang  
Rp3.091.536.012

### B.4 Belanja Barang

Realisasi Belanja Barang per tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp3.091.536.012 dan Rp2.000.388.731. Belanja Barang adalah pembelian barang dan jasa yang habis pakai untuk memproduksi barang dan jasa yang dipasarkan maupun yang tidak dipasarkan. Realisasi Belanja Barang TA 2020 mengalami kenaikan sebesar 54,55% dari Realisasi TA 2019.

Hal ini antara lain disebabkan oleh karena adanya penambahan belanja sewa, alokasi dan realisasi Belanja untuk Bimtek Perencanaan/Sosialisasi Program & Anggaran, dan penanganan pandemi covid19.

Perbandingan Belanja Barang Tahunan (Unaudited) TA 2020 dan 2019

URAIAN	REALISASI T.A. 2020	REALISASI T.A. 2019	%
Belanja Barang Operasional	757.234.436	610.855.705	23,96
Belanja Barang Non Operasional	80.532.000	33.582.800	139,80
Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	109.449.270	65.472.300	67,17
Belanja Jasa	1.102.857.927	522.202.998	111,19
Belanja Pemeliharaan	664.670.936	486.574.235	36,60
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	377.591.443	281.700.693	34,04
Belanja Perjalanan Luar Negeri	-	-	-
	-	-	-
<b>Jumlah Belanja Kotor</b>	<b>3.092.336.012</b>	<b>2.000.388.731</b>	<b>54,59</b>
Pengembalian Belanja	800.000	-	-
<b>Jumlah Belanja</b>	<b>3.091.536.012</b>	<b>2.000.388.731</b>	<b>54,55</b>

Realisasi Belanja Modal  
Rp25.000.000

### B.5 Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal per tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp25.000.000 dan Rp132.952.000. Belanja Modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

Realisasi Belanja Modal pada TA 2020 mengalami penurunan sebesar 81,20% dibandingkan TA 2019 disebabkan oleh Penurunan realisasi belanja modal pada periode yang sama di tahun 2020 dan 2019 disebabkan karena adanya penurunan anggaran terhadap belanja modal pada Tahun 2020..

Perbandingan Belanja Modal Tahunan (Unaudited) TA 2020 dan 2019

URAIAN	REALISASI T.A. 2020	REALISASI T.A. 2019	%
Belanja Modal Tanah	-	-	-
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	25.000.000	132.952.000	(81,20)
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	-	-	-
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	-	-	-
Belanja Modal Lainnya	-	-	-
<b>Jumlah Belanja Kotor</b>	<b>25.000.000</b>	<b>132.952.000</b>	<b>(81,20)</b>
Pengembalian Belanja	-	-	-
<b>Jumlah Belanja</b>	<b>25.000.000</b>	<b>132.952.000</b>	<b>(81,20)</b>

Realisasi Belanja Modal  
Tanah Rp0

#### B.5.1 Belanja Modal Tanah

Realisasi Belanja Modal Tanah per tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Realisasi tersebut pada TA 2020 sebesar 0,00% dibandingkan TA 2019. Hal ini disebabkan oleh Tidak ada kenaikan atau penurunan realisasi belanja modal tanah selama periode Tahun 2020 dibandingkan periode sebelumnya.

Perbandingan Belanja Modal Tanah Tahunan (Unaudited) TA 2020 dan 2019

URAIAN JENIS BELANJA	REALISASI T.A. 2020	REALISASI T.A. 2019	%
Belanja Modal Tanah	-	-	-
Belanja Modal Pembuatan Sertifikat Tanah	-	-	-
	-	-	-
<b>Jumlah Belanja Kotor</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Pengembalian Belanja	-	-	-
<b>Jumlah Belanja</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

Realisasi Belanja Modal  
Peralatan dan Mesin  
Rp25.000.000

#### B.5.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin per tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing sebesar Rp25.000.000 dan Rp132.952.000, mengalami penurunan sebesar 81,20 % bila dibandingkan dengan realisasi TA 2019. Hal ini disebabkan oleh karena adanya penurunan anggaran terhadap belanja modal pada Tahun 2020.



*Perbandingan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahunan (Unaudited) TA 2020 dan 2019*

URAIAN JENIS BELANJA	REALISASI T.A.2020	REALISASI T.A. 2019	%
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	25.000.000	132.952.000	(81,20)
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
<b>Jumlah Belanja Kotor</b>	<b>25.000.000</b>	<b>132.952.000</b>	<b>(81,20)</b>
Pengembalian	-	-	-
<b>Jumlah Belanja</b>	<b>25.000.000</b>	<b>132.952.000</b>	<b>(81,20)</b>

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan Rp0

**B.5.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan**

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan per tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0 Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA 2020 sebesar 0,00% dibandingkan Realisasi TA 2019. Belanja Gedung dan Bangunan ini berasal dari karena tidak ada belanja modal gedung dan bangunan selama periode 31 Desember Tahun 2020.

*Perbandingan Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan Tahunan (Unaudited) TA 2020 dan 2019*

URAIAN JENIS BELANJA	REALISASI T.A. 2020	REALISASI T.A. 2019	%
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	-	-	-
Belanja Penambahan Nilai Gedung dan	-	-	-
	-	-	-
<b>Jumlah Belanja Kotor</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Pengembalian Belanja	-	-	-
<b>Jumlah Belanja</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

**B.6 Catatan Penting Lainnya Laporan Realisasi Anggaran**

Tidak terdapat Catatan Penting Lainnya Laporan Realisasi Anggaran pada periode 31 Desember Tahun Anggaran 2020 ini.

Kas di Bendahara  
Pengeluaran Rp0

## C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

### C.1 Kas di Bendahara Pengeluaran

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0. Kas di Bendahara Pengeluaran merupakan kas yang dikuasai, dikelola, dan berada di bawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa UP/TUP yang belum dipertanggung jawabkan atau belum disetorkan ke Rekening Kas Negara per tanggal neraca. Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran adalah sebagai berikut:

*Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran Tahunan (Unaudited) TA 2020 dan 2019*

Keterangan	TAHUN 2020	TAHUN 2019
-	-	-
<b>Jumlah</b>	-	-

*Penjelasan tentang Kas Di Bendahara Pengeluaran :*

Tidak terdapat Kas di Bendahara Pengeluaran per tanggal 31 Desember 2020

Persediaan  
Rp37.058.780

### C.2 Persediaan

Nilai Persediaan tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing adalah sebesar Rp37.058.780 dan Rp16.830.150. Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Rincian Persediaan per 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

*Rincian Persediaan Tahunan (Unaudited) TA 2020 dan 2019*

Jenis	REALISASI T.A.2020	REALISASI T.A. 2019
Barang Konsumsi	28.377.600	13.245.850
Bahan untuk Pemeliharaan	8.681.180	3.584.300
<b>Jumlah</b>	<b>37.058.780</b>	<b>16.830.150</b>

Persediaan tersebut di atas dalam Persediaan merupakan jenis aset dalam bentuk barang atau perlengkapan (supplies) pada tanggal neraca yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional dan untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Persediaan yang Belum  
Diregister Rp0

### C.3 Persediaan yang Belum Diregister

Nilai Persediaan yang Belum Diregister per tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0.

Piutang Tagihan  
Tuntutan  
Perbendaharaan/Tuntutan  
Ganti Rugi Rp0

### C.4 Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi

Nilai Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi per 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi adalah tagihan kepada bendahara akibat kelalaiannya atau tindakannya yang melanggar hukum yang mengakibatkan kerugian negara. Sedangkan Tuntutan Ganti Rugi adalah tagihan kepada pegawai bukan bendahara untuk penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara karena kelalaiannya. Rincian Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi per 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

*Rincian Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi Tahunan (Unaudited) TA 2020 dan 2019*

Debitur	REALISASI T.A.2020	REALISASI T.A. 2019
-	-	-
<b>Jumlah</b>	-	-

Tanah  
Rp28.332.813.000

### C.5 Tanah

Nilai aset tetap berupa Tanah yang dimiliki per 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebesar Rp28.332.813.000 dan Rp28.332.813.000. Nilai Tanah tersebut, Mutasi nilai Tanah tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

<b>Saldo Nilai Perolehan per 1 Januari 2020</b>	<b>28.332.813.000</b>
<b>Mutasi tambah :</b>	
	-
	-
	-
<b>Mutasi kurang :</b>	
	-
	-
<b>Saldo per 31 Desember 2020</b>	<b>28.332.813.000</b>

Rincian saldo Tanah per 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

#### Rincian Tanah Tahunan (Unaudited) TA 2020

No.	Luas	Lokasi	Nilai
1	1.195	Jln. Seruni Kota Bengkulu	491.231.000
2	2.010	Jln. Batang Hari Kota Bengkulu	904.886.000
3	1.933	Jln. Basuki Rahmat Kota Bengkulu	4.745.422.000
4	586	Jln. Basuki Rahmat Kota Bengkulu	1.480.378.000
5	8.958	Jl. Pembangunan No. 21 Bengkulu	20.710.896.000
<b>Jumlah</b>			<b>28.332.813.000</b>

#### Penjelasan tentang kondisi Tanah

Tidak ada tanah milik Pengadilan Tinggi Bengkulu yang dikuasai oleh pihak ketiga.

Tanah Belum Diregister  
Rp0

### C.6 Tanah Belum Diregister

Nilai aset tetap berupa Tanah Belum Diregister yang dimiliki per per 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebesar Rp0 dan Rp0.

Peralatan dan Mesin  
Rp4.416.479.668

### C.7 Peralatan dan Mesin

Saldo aset tetap berupa Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2020 dan 2019 adalah Rp4.416.479.668 dan Rp4.379.479.668. Nilai Peralatan dan Mesin dan mutasi nilai Peralatan dan Mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

<b>Saldo Nilai Perolehan per 1 Januari 2020</b>	<b>4.379.479.668</b>
<b>Mutasi tambah:</b>	
Pembelian	25.000.000
Hibah	12.000.000
<b>Mutasi Kurang:</b>	
	-
	-
<b>Saldo per 31 Desember 2020</b>	<b>4.416.479.668</b>
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2020	(3.933.246.962)
<b>Nilai Buku per 31 Desember 2020</b>	<b>483.232.706</b>

#### Mutasi transaksi penambahan peralatan mesin berupa:

- Pembelian 2 Unit PC senilai Rp.25.000.000,-
- Hibah 3 Unit AC Split senilai Rp. 12.000.000,-

#### Mutasi transaksi pengurangan peralatan mesin berupa:

- Tidak ada mutasi kurang peralatan dan mesin selama periode 31 Desember 2020

Rincian aset tetap Peralatan dan Mesin disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

Peralatan dan Mesin  
Belum Diregister Rp0

### C.8 Peralatan dan Mesin Belum Diregister

Nilai Peralatan dan Mesin Belum Diregister per 31 Desember 2020 dan 2019 adalah Rp0 dan Rp0.

Gedung dan Bangunan  
Rp9.498.083.000

### C.9 Gedung dan Bangunan

Saldo Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp9.498.083.000 dan Rp9.498.083.000. Mutasi transaksi terhadap Gedung dan Bangunan pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

<b>Saldo Nilai Perolehan per 1 Januari 2020</b>	<b>9.498.083.000</b>
<b>Mutasi tambah:</b>	
	-
<b>Mutasi Kurang:</b>	
	-
	-
<b>Saldo per 31 Desember 2020</b>	<b>9.498.083.000</b>
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2020	(2.614.506.003)
<b>Nilai Buku per 31 Desember 2020</b>	<b>6.883.576.997</b>

*Mutasi transaksi penambahan Gedung dan Bangunan berupa:*

- Tidak ada mutasi tambah Gedung dan Bangunan selama periode 31 desember tahun 2020

*Mutasi transaksi pengurangan Gedung dan Bangunan berupa:*

- Tidak ada mutasi kurang Gedung dan Bangunan selama periode 31 desember tahun 2020

*Rincian aset tetap Gedung dan Bangunan disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.*

Gedung dan Bangunan  
Belum Diregister Rp0

### C.10 Gedung dan Bangunan Belum Diregister

Saldo Gedung dan Bangunan Belum Diregister per 31 Desember 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Mutasi transaksi terhadap Gedung dan Bangunan Belum Diregister pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Jalan, Irigasi dan  
Jaringan Rp0

### C.11 Jalan, Irigasi dan Jaringan

Saldo Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2020 dan 2019 adalah Rp.0 dan Rp.0. Mutasi transaksi terhadap Jalan, Irigasi dan Jaringan pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

<b>Saldo Nilai Perolehan per 1 Januari 2020</b>	-
<b>Mutasi tambah:</b>	
	-
	-
<b>Mutasi Kurang:</b>	
	-
	-
<b>Saldo per</b>	-
Akumulasi Penyusutan s.d.	-
<b>Nilai Buku per</b>	-

Jalan, Irigasi dan  
Jaringan Belum  
Diregister Rp0

### C.12 Jalan, Irigasi dan Jaringan Belum Diregister

Saldo Jalan, Irigasi dan Jaringan Belum Diregister per 31 Desember 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Mutasi transaksi terhadap Jalan, Irigasi dan Jaringan Belum Diregister pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

### C.13 Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2020 dan 2019 adalah Rp.28.490.950 dan Rp.28.490.950. Aset tetap tersebut Tidak ada mutasi tambah Aset Tetap Lainnya selama periode 31 desember tahun 2020.. Mutasi transaksi terhadap Aset Tetap Lainnya pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut :

<b>Saldo Nilai Perolehan per 1 Januari 2020</b>	<b>28.490.950</b>
<b>Mutasi tambah:</b>	
Transfer Masuk	-
Hibah (Masuk)	-
<b>Mutasi Kurang:</b>	
Penghapusan	-
	-
<b>Saldo per 31 Desember 2020</b>	<b>28.490.950</b>
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2020	-
<b>Nilai Buku per 31 Desember 2020</b>	<b>28.490.950</b>

Mutasi tambah/kurang:

Tidak ada mutasi tambah/kurang Aset Tetap Lainnya selama periode 31 Desember Tahun 2020. Rincian Aset Tetap Lainnya disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

### C.14 Aset Tetap yang Belum Diregister

Saldo Aset Tetap yang Belum Diregister per 31 Desember 2020 dan 2019 adalah Rp.0 dan Rp.0.

### C.15 Konstruksi Dalam Pengerjaan

Saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0. Konstruksi Dalam Pengerjaan merupakan aset tetap yang sedang dalam proses pengerjaan atau pembangunan, yang pada tanggal neraca belum selesai dibangun seluruhnya. Mutasi transaksi pada Konstruksi Dalam Pengerjaan pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut :

<b>Saldo Nilai Perolehan per 1 Januari 2020</b>	-
<b>Mutasi tambah:</b>	
	-
<b>Mutasi Kurang:</b>	
	-
<b>Saldo per 31 Desember 2020</b>	-

### C.16 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2020 dan 2019 adalah masing-masing Rp6.547.752.965 dan Rp5.123.647.042. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang disusutkan selama masa manfaat aset yang bersangkutan selain untuk Tanah dan Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP). Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut :

#### Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Tahunan (Unaudited) Tahun 2020

No.	Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
1	Peralatan dan Mesin	4.416.479.668	(3.933.246.962)	483.232.706
2	Gedung dan Bangunan	9.498.083.000	(2.614.506.003)	6.883.576.997
3	Jalan, Irigasi dan Jaringan	-	-	-
4	Aset Tetap Lainnya	28.490.950	-	28.490.950
	<b>Akumulasi Penyusutan</b>	<b>13.943.053.618</b>	<b>(6.547.752.965)</b>	<b>7.395.300.653</b>

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap disajikan pada Lampiran Laporan keuangan ini.

Aset Tak Berwujud Rp0 **C.17 Aset Tak Berwujud**

Saldo Aset Tak Berwujud (ATB) per 31 Desember 2020 dan 2019 adalah Rp0 dan Rp0. Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi tidak mempunyai wujud fisik. Kemitraan Dengan Pihak Ketiga pada Pengadilan Tinggi Bengkulu berupa Software.

Mutasi Aset Tak Berwujud adalah sebagai berikut:

<b>Saldo Nilai per 1 Januari 2020</b>	-
<b>Mutasi tambah:</b>	
Transfer Masuk	-
	-
<b>Mutasi Kurang:</b>	
Penghentiaan Aset Dari Penggunaan	-
	-
<b>Saldo Nilai per 31 Desember 2020</b>	-
Akumulasi Amortisasi s.d. 31 Desember 2020	-
<b>Nilai Buku per 31 Desember 2020</b>	-

*Mutasi transaksi penambahan/pengurangan Aset Tak Berwujud sebagai berikut :*

Tidak ada mutasi tambah/kurang Aset Tak Berwujud selama periode 31 Desember Tahun 2020

Aset Lain-lain Rp0

**C.18 Aset Lain-lain**

Saldo Aset Lain-lain per 31 Desember 2020 dan 2019 adalah Rp0 dan Rp515.952.903. Aset Lain-lain merupakan Barang Milik Negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional entitas. Adapun mutasi Aset Lain-lain adalah sebagai berikut:

<b>Saldo per 1 Januari 2020</b>	<b>515.952.903</b>
<b>Mutasi tambah:</b>	
Pembelian	-
	-
<b>Mutasi Kurang:</b>	
Penghapusan (BMN yang dihentikan)	515.952.903
Saldo Akhir	-
<b>Saldo per 31 Desember 2020</b>	-
Akumulasi Penyusutan 31 Desember 2020	-
<b>Nilai Buku per 31 Desember 2020</b>	-

*Transaksi penambahan dan pengurangan Aset Lain-lain dapat dijelaskan sebagai berikut:*

*Mutasi Tambah*

Tidak ada mutasi tambah Aset Lain-lain selama periode 31 Desember Tahun 2020

*Mutasi Kurang*

- Mutasi Kurang merupakan Aset Tetap dari BMN yang dihentikan penggunaannya

*Rincian Aset Lain-lain berdasarkan nilai perolehan, akumulasi penyusutan dan nilai buku tersaji pada lampiran Laporan Keuangan ini.*

Aset Lainnya yang  
Belum Diregister Rp0

**C.19 Aset Lainnya yang Belum Diregister**

Saldo Aset Lainnya yang Belum Diregister per 31 Desember 2020 dan 2019 adalah Rp0 dan Rp0.



Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya 0

### C.20 Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

Saldo Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya per 31 Desember 2020 dan 2019 adalah Rp0 dan Rp515.942.903. Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya merupakan kontra akun Aset lainnya yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Lainnya. Sedangkan Amortisasi Aset Lainnya merupakan akumulasi amortisasi tak berwujud yang mencakup penurunan kapasitas atau masa manfaat yang diakui pemerintah dari sejak diperoleh atau atau dibeli oleh satker. Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi. Rincian Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya per 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

#### Rincian Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

Aset Lainnya	Nilai Perolehan	Akum. Penyusutan/ Amortisasi	Nilai Buku
<b>Aset Tak Berwujud</b>			
Aset Tak Berwujud	-	-	-
Aset Lain-lain	-	-	-
-	-	-	-
<b>Total</b>	-	-	-

Utang kepada Pihak Ketiga Rp13.146.197

### C.21 Utang kepada Pihak Ketiga

Saldo Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing sebesar Rp13.146.197 dan Rp22.765.387. Utang kepada Pihak Ketiga merupakan kewajiban yang masih harus dibayar dan segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan) sejak tanggal pelaporan. Adapun rincian Utang kepada Pihak Ketiga per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut :

#### Rincian Utang kepada Pihak Ketiga

Uraian	REALISASI T.A.2020	REALISASI T.A.2019
Beban Pegawai yang Masih Harus Dibayar	913.410	2.520.552
Beban Barang yang Masih Harus Dibayar	12.232.787	20.244.835
	-	-
	-	-
	-	-
<b>Total</b>	<b>13.146.197</b>	<b>22.765.387</b>

Penjelasan tentang Utang kepada Pihak Ketiga :

terdapat rincian hutang kepada pihak ketiga pada periode 31 Desember Tahun 2020,

Beban Langganan Air Rp. 312.000  
 Beban Langganan Listrik Rp. 11.764.301  
 Beban Langganan Telepon Rp. 156.486  
 Beban Uang Makan PNS Rp. 697.000  
 Beban Gaji Pokok PNS Rp. 196.700  
 Beban Tunj Suami/Istri PNS Rp.19.670  
 Beban Pembulatan Gaji PNS Rp.40

Hibah Yang Belum Disahkan Rp0

### C.22 Hibah Yang Belum Disahkan

Nilai Hibah Yang Belum Disahkan per 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Hibah Yang Belum Disahkan merupakan hibah yang belum disahkan ke KPPN sampai dengan tanggal pelaporan. Adapun rincian Hibah Yang Belum Disahkan per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut :

#### Rincian Hibah Yang Belum Disahkan

Uraian	Jumlah
Hibah Langsung yang belum disahkan	-
	-
<b>Jumlah</b>	<b>-</b>

Penjelasan tentang Hibah Yang Belum Disahkan :

Pendapatan Diterima  
Dimuka Rp0

### C.23 Pendapatan Diterima Dimuka

Pendapatan Diterima Dimuka per 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Rincian Pendapatan Diterima Dimuka sebagai berikut :

*Rincian Pendapatan Diterima Dimuka adalah sebagai berikut*

Uraian	REALISASI T.A.2019	REALISASI T.A.2019
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
<b>Total</b>	-	-

*Penjelasan tentang Pendapatan Diterima Dimuka :*

Uang Muka dari KPPN  
Rp0

### C.24 Uang Muka dari KPPN

Saldo Uang Muka dari KPPN per 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Uang Muka dari KPPN merupakan Uang Persediaan (UP) atau Tambahan Uang Persediaan (TUP) yang diberikan KPPN sebagai uang muka kerja dan masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan.

*Rincian Uang Muka dari KPPN adalah sebagai berikut :*

Uraian	Jumlah
Uang Persediaan	-
Tambahan Uang Persediaan	-
<b>Total</b>	-

*Penjelasan tentang Uang Muka dari KPPN :*

merupakan kelompok kewajiban yang diharapkan segera diselesaikan dalam waktu kurang dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

Utang Jangka Pendek  
Lainnya Rp0

### C.25 Utang Jangka Pendek Lainnya

Saldo Utang Jangka Pendek Lainnya per 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Utang Jangka Pendek Lainnya merupakan utang jangka pendek lain lain yang akan dilunasi dalam waktu kurang dari 12 bulan.

*Rincian Utang Jangka Pendek Lainnya adalah sebagai berikut*

Uraian	REALISASI T.A.2020	REALISASI T.A.2019
	-	-
	-	-
	-	-
<b>Total</b>	-	-

*Penjelasan tentang Utang Jangka Pendek Lainnya :*

Ekuitas  
Rp35.752.026.236

### C.26 Ekuitas

Ekuitas per 31 Desember 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp35.752.026.236. dan Rp37.116.794.339. Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

### C. 45 Catatan Penting Lainnya neraca

Tidak terdapat Catatan Penting Lainnya Neraca pada periode 31 Desember Tahun Anggaran 2020 ini.



Pendapatan Negara  
Bukan Pajak  
Rp17.195.340

## D. PENJELASAN ATAS POS-POS OPERASIONAL

### D.1 Pendapatan Negara Bukan Pajak

Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebesar Rp17.195.340 dan Rp28.764.920. Realisasi pendapatan negara bukan pajak mengalami penurunan dari tahun sebelumnya sebesar 40,22. Hal tersebut disebabkan oleh karena pada Tahun 2020 tidak ada lagi pemberian persekot gaji pada pegawai di lingkungan Mahkamah Agung RI. Rincian Pendapatan tersebut adalah sebagai berikut :"

*Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak Tahunan (Unaudited) TA 2020 dan 2019*

URAIAN	2020	2019	%
Pendapatan dari Penjualan Tanah, Gedung, dan	-	-	-
Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan	17.195.340	17.264.120,00	(0,40)
dapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara	-	-	-
Penerimaan Kembali Beban Barang Tahun	-	-	-
Penerimaan Kembali Persekot/Uang Muka Gaji l	-	11.500.800,00	(100,00)
<b>Jumlah</b>	<b>17.195.340,00</b>	<b>28.764.920,00</b>	<b>(40,22)</b>

Beban Pegawai  
Rp20.433.896.000

### D.2 Beban Pegawai

Jumlah Beban Pegawai untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp20.433.896.000 dan Rp20.062.739.099.

Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.. Beban Pegawai Tahun 2020 sebesar 1,85 persen dibandingkan dengan Tahun 2019 disebabkan oleh karena adanya penambahan jumlah pegawai Pengadilan Tinggi Bengkulu pada Tahun 2020. Rincian Beban Pegawai Tahunan (Unaudited) Tahun 2020 adalah sebagai berikut :

*Rincian Beban Pegawai Tahunan (Unaudited) TA 2020 dan 2019*

URAIAN	REALISASI T.A.2020	REALISASI T.A. 2019	%
Beban Gaji Pokok PNS	4.801.928.440	4.629.482.720	3,72
Beban Pembulatan Gaji PNS	53.134	52.788	0,66
Beban Tunj. Suami/Istri PNS	395.992.190	373.834.250	5,93
Beban Tunj. Anak PNS	64.102.280	67.105.010	(4,47)
Beban Tunj. Struktural PNS	91.845.000	70.335.000	30,58
Beban Tunj. Fungsional PNS	11.260.040.000	11.235.985.000	0,21
Beban Tunj. PPh PNS	2.094.994.256	2.141.691.771	(2,18)
Beban Tunj. Beras PNS	172.598.700	163.726.860	5,42
Beban Uang Makan PNS	660.237.000	628.955.700	4,97
Beban Tunjangan Umum PNS	55.105.000	51.570.000	6,85
Beban Tunjangan Hakim Ad Hoc	837.000.000	700.000.000	19,57
	-	-	-
<b>Jumlah</b>	<b>20.433.896.000</b>	<b>20.062.739.099</b>	<b>1,85</b>

### D.3 Beban Persediaan

Jumlah Beban Persediaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp56.115.450 dan Rp50.179.450

Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi barang-barang yang habis dipakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Beban Persediaan Tahun 2020 mengalami kenaikan sebesar 11,83 persen dibandingkan dengan Tahun 2019 disebabkan oleh karena meningkatnya permintaan terhadap persediaan barang konsumsi. Rincian Beban Persediaan untuk Tahun 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

*Rincian Beban Persediaan Tahunan (Unaudited) TA 2020 dan 2019*

URAIAN	REALISASI T.A.2020	REALISASI T.A. 2019	%
Beban Persediaan konsumsi	56.115.450	50.179.450	11,83
	-	-	-
	-	-	-
<b>Jumlah Beban Persediaan</b>	<b>56.115.450,00</b>	<b>50.179.450</b>	<b>11,83</b>

### D.4 Beban Barang dan Jasa

Jumlah Beban Barang dan Jasa untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp1.939.312.315 dan Rp1.168.437.690.

Beban Barang dan Jasa terdiri dari beban barang dan jasa berupa konsumsi atas barang dan/atau jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas serta beban lain-lain berupa beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap. Beban Barang dan Jasa Tahun 2020 mengalami kenaikan sebesar 65,97 persen dibandingkan dengan Tahun 2019 disebabkan oleh karena adanya Belanja Sewa Tahun 2020, adanya kegiatan Bimbingan Teknis Penyusunan/Sosialisasi Program & Anggaran Tahun 2020 serta adanya realisasi untuk Penanganan Pandemi COVID-19 pada Tahun 2020 ini. Rincian Beban Barang dan Jasa Untuk Tahun 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut :

*Rincian Beban Barang dan Jasa Tahunan (Unaudited) TA 2020 dan 2019*

URAIAN JENIS BEBAN	REALISASI T.A.2020	REALISASI T.A. 2019	%
Beban Keperluan Perkantoran	465.841.221	413.664.090	12,61
Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	15.931.800	19.828.800	(19,65)
Beban Honor Operasional Satuan Kerja	80.850.000	69.000.000	17,17
Beban Barang Operasional Lainnya	153.624.295	110.170.315	39,44
Belanja Barang Operasional-Penanganan Pandemi COVID-19	34.991.120	-	-
Beban Bahan	66.902.000	-	-
Belanja Barang Non Operasional-Penanganan Pandemi COVID-19	13.630.000	-	-
Beban Langganan Listrik	176.585.971	169.919.941	3,92
Beban Langganan Telepon	2.177.408	14.058.112	(84,51)
<b>Jumlah</b>	<b>1.939.312.315</b>	<b>1.168.437.690,00</b>	<b>65,97</b>

#### D.5 Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp697.955.666 dan Rp500.714.585.

Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Beban Pemeliharaan Tahun 2020 mengalami kenaikan sebesar 39,39 persen dibandingkan dengan Tahun 2019 disebabkan oleh karena adanya realisasi pemeliharaan yang meningkat di tahun 2020 Rincian Beban Pemeliharaan untuk Tahun 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Pemeliharaan Tahunan (Unaudited) TA 2020 dan 2019

URAIAN JENIS BEBAN	REALISASI T.A.2020	REALISASI T.A. 2019	%
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	342.670.382	231.579.657	47,97
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	98.931.525	44.698.000	121,33
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	223.069.029	210.296.578	6,07
Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan	33.284.730	14.140.350	135,39
<b>Jumlah</b>	<b>697.955.666</b>	<b>500.714.585</b>	<b>39,39</b>

#### D.6 Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp377.591.443 dan Rp281.700.693

Beban Perjalanan Dinas merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi dan jabatan. Beban Perjalanan Dinas Tahun 2020 mengalami kenaikan sebesar 34,04 persen disebabkan oleh karena terjadinya Pandemi COVID-19 sehingga ada pembatasan untuk melaksanakan kegiatan Perjalanan Dinas, dan terapat pelaksanaan bimtek di tahun 2020. Rincian Beban Perjalanan Dinas untuk Tahun 2020 dan

Rincian Beban Perjalanan Dinas Tahunan (Unaudited) TA 2020 dan 2019

URAIAN	REALISASI T.A.2019	REALISASI T.A. 2019	%
Beban Perjalanan Biasa	97.711.443	275.250.693	(64,50)
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	4.050.000	6.450.000	(37,21)
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	275.830.000	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
<b>Jumlah</b>	<b>377.591.443,00</b>	<b>281.700.693</b>	<b>34,04</b>

Beban Barang Untuk  
Diserahkan kepada  
Masyarakat Rp0

#### D.7 Beban Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat

Beban Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0

Beban Barang untuk diserahkan kepada Masyarakat/ Pemda merupakan beban pemerintah dalam bentuk barang dan jasa kepada masyarakat yang bertujuan untuk mencapai tujuan entitas. Beban Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat Tahun 2020 sebesar 0,00 dibandingkan dengan Tahun 2019 disebabkan oleh. Rincian Beban Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat Tahun 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut :

*Rincian Beban Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat Tahunan (Unaudited) TA 2020 dan 2019*

URAIAN	REALISASI T.A.2019	REALISASI T.A. 2019	%
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
<b>Jumlah</b>	-	-	-

Beban Bantuan Sosial  
Rp0

#### D.8 Beban Bantuan Sosial

Beban Bantuan Sosial untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0

Beban Bantuan Sosial Tahun 2020 sebesar 0,00 disebabkan oleh . Rincian Tahun 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut :

*Rincian Beban Bantuan Sosial Tahunan (Unaudited) TA 2020 dan 2019*

URAIAN	REALISASI T.A.2020	REALISASI T.A. 2019	%
Beban Peralatan Dan Mesin Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda dalam bentuk barang - Penanganan Pandemi COVID-19	-	-	-
	-	-	-
<b>Jumlah</b>	-	-	-

Beban Penyusutan dan  
Amortisasi  
Rp792.951.320

#### D.9 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk periode yang berakhir 31 Desember 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp792.951.320 dan Rp903.233.232.

Beban Penyusutan dan Amortisasi merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (depreciable assets) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud

Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk Tahun 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut :

*Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi Tahunan (Unaudited) TA 2020 dan 2019*

URAIAN	REALISASI T.A.2020	REALISASI T.A. 2019	%
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	264.651.117	319.866.934	(17,26)
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	528.300.203	583.331.298	(9,43)
Beban Penyusutan Penyusutan Aset Tetap yang Tidak	-	35.000	(100,00)
<b>Jumah Penyusutan</b>	<b>792.951.320</b>	<b>903.233.232</b>	<b>(12,21)</b>
	-	-	-
<b>Jumlah Amortisasi</b>	-	-	-
<b>Jumlah</b>	<b>792.951.320</b>	<b>903.233.232</b>	<b>(12,21)</b>

Beban Penyisihan  
Piutang Tak Tertagih  
Rp0

#### D.10 Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih

Jumlah Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp-7.250

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih merupakan beban untuk mencatat estimasi ketidaktertagihan piutang dalam suatu periode. Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk Tahun 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut :

*Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih Tahunan (Unaudited) TA 2020 dan 2019*

URAIAN JENIS BEBAN	REALISASI T.A.2020	REALISASI T.A. 2019	%
Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Jangka Panjang - Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi	-	(7.250)	(100)
Beban Penyisihan Piutang Lainnya	-	-	-
	-	-	-
<b>Jumlah</b>	<b>-</b>	<b>(7.250)</b>	<b>(100)</b>

Surplus (Defisit)  
Penjualan Aset Non  
Lancar Rp5.989.999

#### D.11 Surplus (Defisit) Penjualan Aset Non Lancar

Jumlah Surplus (Defisit) Penjualan Aset Non Lancar untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp5.989.999 dan Rp0

*Rincian Surplus (Defisit) Penjualan Aset Non Lancar Tahunan (Unaudited) TA 2020 dan 2019*

URAIAN JENIS BEBAN	REALISASI T.A.2020	REALISASI T.A. 2019	%
Beban Kerugian Pelepasan Aset	(10.000)	-	-
Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	5.999.999	-	-
<b>Jumlah</b>	<b>5.989.999,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

Surplus (Defisit)  
Penyelesaian  
Kewajiban Jangka  
Panjang Rp0

#### D.12 Surplus (Defisit) Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang

Jumlah Surplus (Defisit) Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0

*Rincian Surplus (Defisit) Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang Tahunan (Unaudited) TA 2020 dan 2019*

URAIAN JENIS BEBAN	REALISASI T.A.2020	REALISASI T.A. 2019	%
	-	-	-
	-	-	-
<b>Jumlah</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

Surplus (Defisit) dari  
Kegiatan Non  
Operasional Lainnya  
Rp179.540

#### D.13 Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya

Jumlah Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya untuk untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp179.540 dan Rp-252.766.

*Rincian Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya Tahunan (Unaudited) TA 2020 dan 2019*

URAIAN JENIS BEBAN	REALISASI T.A.2020	REALISASI T.A. 2019	%
Penerimaan Kembali Beban Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	-	234,00	(100,00)
Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan	1.617.370	518.700,00	211,81
Beban Penyesuaian Nilai Persediaan	(1.437.830)	(771.700,00)	86,32
	-	-	-
	-	-	-
<b>Jumlah</b>	<b>179.540,00</b>	<b>(252.766)</b>	<b>(171,03)</b>

*Pos Luar Biasa Rp0*

**D.14 Pos Luar Biasa**

Jumlah Pos Luar Biasa untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0

Pos Luar Biasa terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak sering terjadi dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi serta di luar kendali entitas. Rincian Pos Luar Biasa Tahun 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut :

*Rincian Pos Luar Biasa Tahunan (Unaudited) 2020 dan 2019*

URAIAN JENIS BEBAN	REALISASI T.A.2020	REALISASI T.A. 2019	%
Pendapatan PNB	-	-	-
Beban Perjalanan Dinas	-	-	-
Beban Persediaan	-	-	-
	-	-	-
<b>Jumlah</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

Terjadinya pos-pos luar biasa disebabkan sebagai berikut :

**D.15 Catatan Penting Lainnya Laporan Operasional**

Tidak terdapat Catatan Penting Lainnya Laporan Operasional pada periode 31 Desember Tahun Anggaran 2020 ini.



## E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

*Ekuitas Awal  
Rp37.116.794.339,00*

### E.1 Ekuitas Awal

Nilai Ekuitas Awal pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp.37.116.794.339,00 dan Rp.38.056.622.946,00

*Defisit LO Rp.-  
24.274.457.315,00*

### E.2 Surplus (Defisit) LO

Jumlah Surplus (Defisit) LO untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebesar Rp.-24.274.457.315,00 dan Rp.-22.938.485.345,00. Surplus/Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

*Dampak Kumulatif  
Perubahan Kebijakan  
Akuntansi/Kesalahan  
Mendasar Rp.0,00*

### E.3 DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR

Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar untuk tahun 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0.

### E.4 KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS

Koreksi yang Menambah/Mengurangi Ekuitas tahun pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp.-631.154.603 dan Rp.-24.974.123 yaitu sebagai

*Penyesuaian Nilai Aset  
Rp.0,00*

#### E.4.1 Penyesuaian Nilai Aset

Penyesuaian Nilai Aset tahun 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0. Penyesuaian Nilai Aset merupakan hasil penyesuaian nilai persediaan akibat penerapan kebijakan harga perolehan terakhir.

*Koreksi Nilai  
Persediaan Rp0,00*

#### E.4.2 Koreksi Nilai Persediaan

Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang diakibatkan karena kesalahan dalam pencatatan persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya. Koreksi untuk tahun 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp.0,00 dan Rp.0,00. Rincian Koreksi Nilai Persediaan untuk tahun 2020 adalah sebagai berikut:

#### *Rincian Koreksi Nilai Persediaan*

Jenis Persediaan	Nilai Koreksi
Koreksi Nilai Persediaan	-
	-
<b>Jumlah</b>	<b>-</b>

*Koreksi Atas  
Reklasifikasi Rp-  
631.154.603,00*

#### E.4.3 Koreksi Atas Reklasifikasi

Koreksi Atas Reklasifikasi tahun 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp.-631.154.603 dan Rp.0. Koreksi Atas Reklasifikasi merupakan koreksi atas kesalahan reklasifikasi Persediaan/Aset Tetap/Aset Lainnya.

Jenis Koreksi	Nilai Koreksi
Koreksi atas Reklasifikasi Persediaan/Aset Tetap/Aset Lainnya	(631.154.603)
	-
<b>Jumlah</b>	<b>(631.154.603,0)</b>

*Selisih Revaluasi Aset  
Rp.0,00*

#### E.4.4 Selisih Revaluasi Aset

Selisih Revaluasi Aset untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp.0,00 dan Rp.-28.011.000,00. Revaluasi tersebut berasal

Selisih Revaluasi Nilai Aset Tetap mencerminkan koreksi atas kesalahan pencatatan kuantitas aset pada laporan keuangan Rincian untuk tahun 2020 adalah sebagai berikut:

Rincian Selisih Revaluasi Aset Tahun 2020

Jenis Aset	Nilai Koreksi
Ekuitas Transaksi Lainnya	-
Revaluasi Aset Tetap	-
	-
<b>Jumlah</b>	<b>-</b>

Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi Rp0

**E.4.5 Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi**

Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember

Rincian Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi Tahun 2020

Jenis Aset Tetap Non Revaluasi	Nilai Koreksi
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	-
	-
<b>Jumlah</b>	<b>-</b>

Koreksi Lain-Lain Rp0

**E.4.6 Koreksi Lain-Lain**

Koreksi Lain-Lain untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.1. Koreksi Lain-lain merupakan koreksi selain yang terkait Barang Milik Negara, antara lain koreksi atas pendapatan, koreksi atas beban, koreksi atas hibah, piutang dan utang.. Koreksi ini adalah . Koreksi Lain-Lain terdiri dari :

Rincian Koreksi Lain-Lain Tahun 2020

Jenis Koreksi	Nilai Koreksi
Koreksi Lainnya	-
	-
<b>Jumlah</b>	<b>-</b>

Transaksi Antar Entitas Rp23.541.757.225

**E.5 Transaksi Antar Entitas**

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp.23.541.757.225 dan Rp.22.023.630.861. Transaksi Antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal Kementerian /Lembaga (KL), antar KL, antar BUN maupun KL dengan BUN. terdiri dari :

Rincian Transaksi Antar Entitas Tahun 2020

Transaksi Antar Entitas	Nilai
Ditagihkan ke Entitas Lain	23.552.952.564
Diterima dari Entitas Lain	(23.195.339)
Transfer Keluar	-
Transfer Masuk	-
Pengesahan Hibah Langsung	12.000.000
Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung	-
	-
<b>Jumlah</b>	<b>23.541.757.225</b>

Rincian Transaksi Antar Entitas terdiri dari :

**E.5.1 Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL)**

Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL) merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada KL yang melibatkan kas negara (BUN). Pada periode hingga 31 Desember 2020, DKEL sebesar Rp 23.552.952.564, sedangkan DDEL sebesar Rp 23.195.339



### E.5.2 Transfer Masuk/Transfer Keluar

Transfer Masuk/Transfer Keluar merupakan perpindahan aset/kewajiban dari satu entitas ke entitas lain pada internal KL, antar KL dengan BA-BUN.

Transfer Keluar sampai dengan 31 Desember 2020 sebesar Rp0 terdiri dari :

#### Rincian Transfer Keluar Tahun 2020

Jenis	Entitas Tujuan	Nilai
-	-	-
-	-	-
<b>Jumlah</b>		-

Sedangkan Transfer Masuk sampai dengan 31 Desember 2020 sebesar Rp0 yang terdiri dari :

Jenis	Entitas Asal	Nilai
-	-	-
-	-	-
<b>Jumlah</b>		-

### E.5.3 Pengesahan Hibah Langsung

Pengesahan Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan hibah langsung KL dalam bentuk kas, barang maupun jasa sedangkan pencatatan pendapatan hibah dilakukan BA-BUN. Pengesahan Hibah Langsung sampai dengan 31 Desember 2020 adalah sebesar 12.000.000 dari total Rp0 yang akan diterima sepanjang tahun 2020

Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan pengembalian hibah langsung entitas. Pengembalian Pengesahan Hibah Langsung sampai dengan 31 Desember 2020 adalah sebesar 0 dari total Rp0.

Rincian Pengesahan Hibah Langsung untuk Tahun 2020 adalah sebagai berikut :

Pemberi Hibah	Bentuk Hibah	Nilai
M. Eka Kartika SH, M.Hum	Barang	12.000.000
-	-	-
<b>Total Pengesahan</b>		<b>12.000.000,00</b>
Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung	-	-
<b>Jumlah</b>		<b>12.000.000</b>

Rincian Penerimaan Hibah Langsung Tahun 2020 disajikan pada lampiran

Ekuitas Akhir  
Rp35.752.026.236

### E.6 Ekuitas Akhir

Nilai Ekuitas Akhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp.35.752.026.236,00 dan Rp.37.116.794.339,00.

### E.7 Catatan Penting Lainnya Laporan Perubahan Ekuitas

Tidak Terdapat Catatan Penting Lainnya Laporan Perubahan Ekuitas pada periode 31 Desember Tahun Anggaran 2020 ini

## **F. PENGUNGKAPAN PENTING LAINNYA**

### **F.1 KEJADIAN-KEJADIAN SETELAH TANGGAL NERACA**

Pada Periode 31 Desember Tahun Anggaran 2020 ini tidak ada kejadian penting setelah tanggal neraca yang layak untuk dijadikan catatan dalam laporan keuangan ini.

### **F.2 PENGUNGKAPAN LAIN-LAIN**

#### **F.2.1. Temuan dan Tindak lanjut Temuan BPK**

Tidak terdapat temuan dan tindak lanjut temuan BPK

#### **F.2.2. Informasi Pendapatan dan Belanja secara Akrual**

Terdapat Belanja secara Akrual pada 31 Desember Tahun Anggaran 2020, berupa:

- Beban Langganan Air sebesar Rp. 312.000
- Beban Langganan Listrik sebesar Rp. 11.764.301
- Beban Langganan Telepon sebesar Rp. 156.486
- Beban Uang Makan PNS Rp. 697.000
- Beban Gaji Pokok PNS Rp. 196.700
- Beban Tunj Suami/Istri PNS Rp. 19.670
- Beban Pembulatan Gaji PNS Rp. 40

#### **F.2.3. Rekening Pemerintah**

Rekening pemerintah yang digunakan dalam kegiatan operasional Pengadilan Tinggi Bengkulu adalah:

BRI Cabang Bengkulu A/C 0115-01-001585-30-1 A.n BPG 016 Pengadilan Tinggi Bengkulu yang digunakan sebagai Penampung DIPA BUA dengan saldo akhir per tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp.0.

Nomor Surat Ijin (Perubahan Nama Rekening) dari KPPN : S-118/WPB.09/KP.016/2015 Tanggal 28 Januari 2015.

#### **F.2.4. Revisi DIPA**

Informasi mengenai revisi DIPA dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Revisi DIPA ke-1 Pergeseran antar Pagu Belanja Barang Tanggal 3 Maret 2020
2. Revisi DIPA ke-2 Halaman ke-III DIPA Rencana Penarikan tanggal 29 April 2020
3. Revisi ke-3 Pergeseran Pagu Belanja Barang, tanggal 02 Juli 2020
4. Revisi ke-4 Pergeseran Antar Pagu Belanja Barang, tanggal 31 Agustus 2020
5. Revisi ke-5 Pergeseran Antar Pagu Belanja Barang, tanggal 9 September 2020
6. Revisi ke-6 Penambahan Pagu, tanggal 02 Oktober 2020
7. Revisi ke-7 Pergeseran Antar Pagu Belanja Barang, tanggal 9 November 2020
8. Revisi ke-8 Penambahan Pagu, tanggal 4 Desember 2020
9. Revisi ke-9 Pergeseran Antar Pagu, tanggal 14 Desember 2020

#### **F.2.5. Ralat SPM, SSBP, dan SSPB**

Informasi mengenai Ralat SPM, SP2D, SSBP, SSPB pada periode Triwulan III Tahun Anggaran 2020 ini adalah Ralat Akun Belanja Barang Penanganan Pandemi Covid-19 yang dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. SPM Nomor : 00068, yaitu koreksi Ralat Akun :  
Semula Akun : 521119 senilai Rp.1.647.420,-  
Menjadi Akun : 521131, senilai Rp.897.420,- (Pembelian Thermometer Digital)  
Akun : 521119, senilai Rp.750.000,-
2. SPM Nomor : 00069, yaitu koreksi Ralat Akun  
Semula Akun : 521119, senilai Rp.3.741.200,-  
Menjadi Akun : 521131, senilai Rp.471.000,- (Pembelian Handsanitizer & Alkohol)  
Akun : 521119, senilai Rp.3.270.000,-
3. SPM Nomor : 00074, yaitu koreksi Ralat Akun dan BA.Unit  
Semula Akun : 811911, senilai Rp.659.000,-  
BA. Unit: 999.99, senilai Rp.1.459.510,-  
Menjadi Akun : 511111, senilai Rp.659.000,-  
BA. Unit : 005.01 senilai Rp.1.459.510,-
4. SPM Nomor : 00082, yaitu koreksi Ralat Akun  
Semula Akun : 521119, senilai Rp.8.971.000,-

Menjadi Akun : 521131, senilai Rp.1.439.000,- (Pembelian Botol Handsanitizer,  
Handsanitizer, Baby Oil, Alkohol & Masker)  
Akun : 521119, senilai Rp.7.532.000,-

5. SPM Nomor : 00100, yaitu koreksi Ralat Akun  
Semula Akun : 521119, senilai Rp.4.871.795,-  
Menjadi Akun : 521131, senilai Rp.150.000,- (Pembelian Botol Handsanitizer)  
Akun : 521119, senilai Rp.4.721.795,-

6. SPM Nomor : 00197, yaitu koreksi Ralat Akun  
Semula BA. Unit : 999.99, senilai Rp.1.459.510,-  
Menjadi BA. Unit : 005.01, senilai Rp.1.459.510,-

#### **F.2.6. Catatan Penting Lainnya**

Tidak terdapat Catatan Penting Lainnya yang dapat dijabarkan pada periode Laporan 31 Desember Tahun 2020 ini.